

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang disebut agen (manajer) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-harinya. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi karena pihak –pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan berbeda. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin (Sutedi, 2011).

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*).

- a. masalah keagenan muncul karena adanya berbagai tipe. Adapun penjelasan dari masing – masing tipe tersebut adalah sebagai berikut Konflik antara manajer dan pemegang saham Tim manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Sugiarto, 2009). Terkadang hal tersebut tidak sejalan akibat banyaknya keputusan yang diambil manajer menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham.
- b. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas Pemegang saham mayoritas yang biasanya menjadi manajer di perusahaan dapat mengambil keputusan yang hanya menguntungkan pemegang saham minoritas.
- c. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas Pemegang saham mayoritas yang biasanya menjadi manajer di perusahaan dapat mengambil keputusan yang hanya menguntungkan pemegang saham minoritas.

Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diatasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. *corporate governance* (tata kelola perusahaan) merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return* (Theresia, 2005).

2.1.2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu :

a. Prinsip perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*fairness*)

Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainnya). Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsep *stakeholders* (pemegang saham saja).

b. Prinsip Transparasi

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu.

c. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya.

d. Prinsip Responsibilitas

Prinsip dimana pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya (Sukrisno, 2011).

Menurut pedoman umum Corporate governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2008, prinsip-prinsip tersebut meliputi 5 aspek, yaitu :

a. *Tranparansi (Tranparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh perundang undangan saja akan tetapi juga beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikeola dengan benar oleh pihak yang terkait seperti manajemen, akan tetapi hal itu harus mempertimbangkan akan kebutuhan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan syarat dasar agar mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

d. *Independensi (Independency)*

Demi terlaksananya asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing masing dari organ perusahaan tidak saling mendominasi atau tidak ada intervensi dengan pihak yang lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaran.

2.1.3. Manfaat Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

dengan adanya penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam suatu perusahaan akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholder*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatnya nilai saham perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.
4. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Maardiansya & Wardani, 2012).

Menurut *forum of corporate governance in Indonesia* (FCGI) penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan menghasilkan beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan *dividen*.

2.1.4. Tujuan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Adapun Tujuan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatnya nilai perusahaan dan para pemegang saham

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

2.1.5. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

2.1.5.1. Komite Audit

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan No. IX. 15. Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris. Komite audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal (Forker, 1992). Dalam tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit dan eksternal.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/ dewan pengawas.

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada di suatu perusahaan. Dalam peraturan No. IX. 15 disebutkan bahwa komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.1.5.2. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat

berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik.

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2005). kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan masalah keagenan (Jensen & William H. Meckling, 1997).

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2005). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005).

1. Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen & William H. Meckling, 1997). Mekanisme pengawasan terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, olehkarena itu salahsatu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Haruman, 2008).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah & Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

ketika kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunity* manajer yang akan meningkat juga (Jensen & William H. Meckling, 1997). Dengan adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen & William H. Meckling, 1997). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan .

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.

Masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti :

1. Kepemilikan Menyebar

Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.

2. Kepemilikan Terkonsentrasi

Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling interest* (kepemilikan saham pengendalian) dan *minorit interest* (kepemilikan saham minoritas / *shareholders*).

3. Kepemilikan dalam BUMN

Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, atau wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.

2.1.6. Biaya Keagenan

Masalah agensi yang disebabkan karena masalah kepentingan antara prinsipal dan agen dan adanya asimetris informasi. Masalah Keagenan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang harus dikeluarkan. biaya keagenan terdiri dari:

1. *The monitoring expenditures by the principle.*

Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*. Biaya pengawasan oleh prinsipal seperti: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakkan peraturan atau kebijakan peraturan khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan biaya terkait ekuitas pihak luar.

2. *The bonding expenditures by the agent.*

The *bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Biaya ini juga sering disebut dengan biaya pengikatan oleh agen. Biaya pengikatan ini seperti: biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait *covenant* dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi

3. *The residual loss*

Penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*. Kerugian residual yang mungkin ada seperti: resiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Besaran biaya keagenan ini dapat dibatasi dengan kualitas pengendalian oleh pemilik dan pihak ketiga yang menerima delegasinya (seperti bank) yang memantau tindakan manajer dari luar (Jensen & William H. Meckling, 1997).

Mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan diantaranya dengan mekanisme kontrol dan monitoring seperti, pembentukan dewan komisaris, pasar *corporate control*, pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi, dan pasar

manajer. Mekanisme kedua adalah mekanisme kontrol dengan peningkatan kepemilikan manajer, dan yang ketiga adalah dengan mekanisme kontrol dengan bonding (Arifin, 2002).

Penelitian ini menggunakan rasio perputaran aset (asset turn over) sebagai proxy biaya keagenan. Perputaran aset yaitu rasio yang mengukur efektifitas manajemen perusahaan dalam menggunakan aset. Rasio aset terhadap penjualan yang tinggi mengindikasikan aset secara signifikan meningkatkan penjualan yang juga meminimumkan biaya keagenan. Rasio perputaran aset yang rendah berarti manajemen perusahaan mengimplikasikan kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Rendahnya rasio ini mengindikasikan tingginya biaya keagenan dan penggunaan aset yang tidak efisien dan efektif.

2.2. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

mengenai hubungan pengaruh *good corporate* dan struktur kepemilikan terhadap *agency cost*

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	<i>Chrisosto Mos Florackis Dan Ayadin Ozkan (2009)</i>	Variable Dependen : Agency cost Variable Independen: Manajerial <i>Compensation,</i> <i>Board of directors,ownership concentration</i>	<i>Cross Sectional Regression</i>	Karakteristik struktur modal perusahaan,yaitu utang bank dan jatuh tempo utang, merupakan dua dari perangkat tata kelola perusahaan yang paling penting bagi perusahaan-perusahaan inggris juga. kepemilikan manajerial, kompensasi manajerial dan konsentrasi

		<i>managerial ownership,debt financing</i>		kepemilikan tampak untuk memainkan peran penting dalam mengurangi biaya agensi.
2	<i>Philip.J meknigh dan Charlie Weir (2009)</i>	Variable Dependen: Biaya keagenan Varibel Independen: <i>Board characteristic</i> Kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional	<i>Fixed-Effects, Instrumental variabls and Tobit regression</i>	Komite nominasi meningkatkan biaya keagenan, meningkatkan kepemilikan dewan mengurangi biaya keagenan dan hutang akan mengurangi biaya keagenan
3	Etha Rizki Aryani (2011)	Variabel Dependen : Agency cost Variabel Independen: Komposisi dewan, Kepemilikan institusional, kepemilikan BUMN, kepemilikan asing,	Regresi berganda	Variabel yang mempengaruhi biaya keagenan adalah variabel kepemilikan BUMN, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi biaya keagenan adalah

		kepemilikan terkonsentrasi		komposisi dewan dan kepemilikan terkonsentrasi.
4	Linda (2012)	Variabel Dependen : Biaya keagenan Variabel Independen : Eksekutif direktur, non-eksekutif, komite audit, short debt	Teknik PLC	Komite audit mengurangi biaya keagenan, rasio debt jangka pendek, komite komisaris dan eksekutif meningkatkan biaya keagenan
	Gul Sajid, Muh.Saji, Nasir Razzaq (2012)	Variable Dependen : <i>Agency cost</i> Variable Independen : <i>Board size, board independence, CEO/Chair duality, Remuneration structure, manajerial ownership, institusional ownership, external ownership</i>	Multivariate Fixed regression	Perusahaan dengan struktur kepemilikan manajerial institusional Dapat mengurangi biaya keagenan.komposisi dewan yang lebih kecil maka mengurangi biaya keagenan. Dewan komisaris independensi berhubungan positif dengan biaya keagenan.serta pemisahaan antara CEO dan Chairman dewan remunerasi yang tinggi

				akan mengurangi biaya keagenan
--	--	--	--	--------------------------------

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan tinjauan pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran pada Gambar 2.1.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Komite Audit terhadap Agency Cost (Biaya Agensi)

Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam peraturan Nomor IX.15 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya masalah agensi. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk

meningkatkan kesejahterannya sendiri dapat diminimalisir (Effendi, 2005). Komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, 1992).

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada di suatu perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian (Bursa Efek Jakarta, 2000). Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif sehingga para manajemen akan berusaha meningkatkan penjualan. Meningkatnya penjualan menandakan bahwa manajemen dapat menghasilkan rasio perputaran aset yang tinggi. Adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam mekanisme corporate governance yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Komite Audit berpengaruh positif terhadap ATO

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agency Cost (Biaya Agensi)

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan.

kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan (Jensen & William H. Meckling, 1997). Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan (agency costs) selain dari itu level kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini juga didukung oleh Shleifer dan Vishny (1997), kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara

pemegang saham luar dengan manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan ini akan mengindikasikan tingginya rasio perputaran aset. Pihak manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam Memaksimalkan kinerja perusahaan dan menghasilkan perputaran aset yang tinggi, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah (Anggraini, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ATO.

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agency Cost (Biaya Agensi)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sutedi, 2011).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* (Wahyudi & Pawestri, 2006).

kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memonitor manajemen agar bertindak sesuai dengan harapan pemegang saham. Semakin tinggi pengawasan terhadap manajemen akan semakin tinggi pengaruh terhadap manajemen untuk melakukan kinerja dengan baik dan menghasilkan perputaran asset yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap ATO.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, kerangka penelitian ini dapat digambarkan pada sebagai berikut:

gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



